|  |  |
| --- | --- |
|  | D:\Dokumen Mocher\desktop\logo UMB.jpg |
|  | **MODUL PERKULIAHAN** |
|  |  |
|  | **Opini Publik** |
|  |  |
|  | **TEKNIK POLLING DALAM OPINI PUBLIK** |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |   |  |  |  |
|  | **Fakultas** | **Sesi** | **Modul Online** | **Kode MK** | **Disusun Oleh** |  |
|  | **Ilmu Komunikasi** | **13** |  **11** | **HMJ201** | **Yumeldasari Chaniago, S.Sos., M.Si** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Abstract** | **Kompetensi** |
| Pokok bahasan pemahaman tentang teknik polling dalam opini publik.  | Mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan bagaimana teknik polling digunakan dalam opini publik. |

# PENDAHULUAN

Opini publik adalah hal yang selalu dan pasti akan terus terjadi selama ada hal yang dapat dikomentari atau menjadi bahan publik. Opini publik tak ubahnya seperti satu sisi uang logam dengan sisi lainnya adalah peristiwa. Berarti opini publik terjadi juga dalam segala hal/peristiwa. Misalnya, dalam hal perdagangan, harga naik, orang mengeluh dan bisa tidak jadi membeli, sebaliknya harga turun, orang bergembira dan bisa membeli lagi bahkan dalam jumlah yang banyak. Hal itu membuktikan bahwa opini publik mempunyai dampak tersendiri yang memengaruhi seseorang dalam menilai suatu hal.

Dampak dari opini publik tidak hanya memengaruhi tindakan seseorang dalam jual beli tapi juga dapat membentuk cerita/ideologi/nilai yang tertanam pada masyarakat hingga turun temurun, seperti mitos, ideologi dan utopia. Pengaruh besar yang ditimbulkan oleh opini publik haruslah dapat dikontrol jika tidak ingin terjadi hal di luar keinginan.

Opini Publik terjadi akibat persepsi-persepsi yang timbul dan kemudian berkembang. Karena opini publik bukan organisasi dan tidak ada pemimpinnya maka opini publik tidak bisa dikendalikan, pasti selalu ada pro dan kontra. Perbedaan-perbedaan tersebutlah yang kemudian menjadi dampak di masyarakat.

Dampak opini publik bisa positif bisa negatif bagi masyarakat. Dampak negatifnya adalah menyebarluasnya desas-desus akan sesuatu hal tanpa bukti akibat opini publik. Contohnya, supersemar yang sampai sekarang masih tidak jelas apakah benar-benar ada atau hanya rekayasa politik saja. Dampak positifnya seperti misalnya menyebarluasnya berita baik seeseorang akibat opini publik yang dapat meningkatkan prestise orang yang diberitakan.

Sebagian dari dampak opini publik yang banyak adalah terbentuknya mitos, ideologi dan utopia. Opini masyarakat kebanyakan yang lama-lama seakan telah menempel pada kehidupan masyarakat dan bertahan lama hingga sekarang. Mitos di Indonesia banyak yang menyuguhkan bukti yang dikait-kaitkan pada cerita. Misalnya, Gunung Tangkuban Perahu yang dianggap menjadi bukti dari cerita Sangkuriang. Ideologi di Indonesia adalah pancasila yang dihasilkan dari pemikiran panjang setelah melihat dan mengenali keadaan bangsa. Utopia adalah harapan-harapan yang indah-indah yang dianggap seperti surga bagi manusia. Diperkirakan opini dan istilah ini muncul dari harapan-harapan masyarakat akan kedamaian di dunia yang hingga kini belum tercapai di dunia.

## Prinsip-Prinsip Opini Publik

Pendekatan prinsip terhadap kajian opini publik dapat dibagi menjadi empat kategori:

1. [Pengukuran](http://id.wikipedia.org/wiki/Pengukuran) kuantitatif terhadap [distribusi](http://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi) opini
2. [Penelitian](http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian) terhadap hubungan internal antara opini individu yang membentuk opini publik pada suatu permasalahan
3. Deskripsi tentang atau analisis terhadap peran publik dari opini publik
4. Kajian baik terhadap media [komunikasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi) yang memunculkan gagasan yang menjadi dasar opini maupun terhadap penggunaan media oleh pelaku propaganda dan manipulasi.

## Syarat-Syarat Opini Publik

Tumbuhnya opini publik yang baik, sehat dan tepat memerlukan beberapa syarat berikut ini:

1. Harus ada kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat/perasaan serta kebebasan pers
2. Minat rakyat terhadap soal-soal pemerintahan cukup besar
3. Pendidikan politik yang cukup tinggi sudah dimiliki rakyat
4. Kesediaan masyarakat mengutamakan kehendah atau kepentingan bersama

Alat-alat yang biasa digunakan untuk membentuk opini publik adalah pers, organisasi politik, dan organisasi non-politik. Cara-cara untuk mengukur opini publik dapat dilakukan dengan:

1. *Polling;*pengumpulan suara/pendapat masyarakat secara lisan atau tertulis
2. *Attitude scales;*dilakukan dengan maksud menetapkan bebera banyak orang yang setuju atau tidak setuju mengenai suatu masalah
3. *Interview;* yang bersifat umum atau terbuka
4. Tulisan-tulisan dalam surat kabar yang mengemukakan pendapatnya dengan maksud memancing timbulnya reaksi yang berwujud tulisan balasan dari pihak lain. Dari tulisan balasan tersebut diambil kecenderungan opini publik.

Untuk apa pendapat masyarakat atau pendapat umum diketahui? Bagi suatu negara yang menganut prinsip keterbukaan berdemokrasi, pendapat umum sangat diperhatikan oleh setiap petugas negara atau pejabat publik, sebab keputusan yang mereka ambil harus sesuai dengan keinginan masyarakat. dalam konteks komunikasi politik, jejak pendapat menepati posisi penting untuk mengukur dan menganalisis di negara-negara yang menganutsistem demokrasi. Bisa dikatakan negara-negara tersebut tidak ada pengganti kepala negara yang luput dari bidikan polling.

Bagi para pemimpin negara, pemimpin politik, atau para kandidat yang ingin bertarung dalam pemilihan, umumnya menggunakan jasa perusahaan jajak pendapat untuk mengetahui sejauh mana kekuatan dukungan massa terhadap citra para kandidat. Jajak pendapat bagi masyarakat AS boleh dikata sudah menjadi bagian dari budaya demokrasi mereka.

Jajak pendapat mempunyai pengaruh besar dalam kampanye politik, terutama untuk melihat favorit tidaknya para calon. Hasil jajak sering kali digunakan sebagai amunisi perang urat syaraf, tetapi bisa juga menjadi peluang bagi kandidat yang lain untuk menyusun strategi perlawanan.

Begitu pentingnya peranan polling, sehingga Adam dan Swanson (1990) berpendapat bahwa liputan yang diberikan media terhadap kandidat partai Demokrasi di AS memiliki hubungan yang hampir sama dengan hasil jajak pendapat terhadap tingkat rangking yang diperoleh partai demokrasi dalam pemilu.

Dalam kaitannya dengan pemilihan pejabat publik, apakah itu presiden, gubernur atau bupati, maka jajak pendapat dibutuhkan (Eryanto, 1999) untuk keperluan:

* 1. Sarana bagi kandidat untuk memperkenalkan dirinya kepublik sejak awal, atau kepada partai yang akan mengusung calon.
	2. Membantu kandidat untuk mengetahui isu yang didukung oleh publik.
	3. Membantu kandidat untuk mengetahui bukan saja apa yang diinginkan publik, tetapi bagaimana juga publik menilai kandidat.
	4. Menjadi bagian dari strategis kampanye dimana jajak pendapat tidak hanya memberi informasi kepada publik, tetapi juga citra diri yang diinginkan kepada publik.
	5. Di samping dapat mengukur kekuatan kandidat didepan publik, juga dapat mengukur secara akurat bagai mana perspsi publik terhadap lawan politik.

Untuk mengetahui hal itu, Ilmu sosial telah mengembangkan suatu metode yang disebut sampel survei. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan pendapat dari sampel yang representatif dari populasi yang menjadi target sasaran.
Bagaimana cara menetapkan sampel dengan tepat dan efisien?

Dari beberapa literatur metodologi riset, disebutkan cara yang dapat digunakan dalam penarikan sampel, antara lain:

1. Sampel acak (random sampling) adalah suatu metode penarikan sampel dari populasi dengan cara memberi kesempatan yang sama kepada semua anggota popolasi untuk jadi sampel.
2. Sampel Sistematik (systematic samling) adalah suatu metode penarikan sampel dengan cara membagi jumlah populasi yang telah didaftar dengan besarnya sampel yang akan diambil.
3. Sampel Stratifikasi (stratified sampling) adalah metode penarikan sampel dengan cara mengkalsifikasi populasi lebih awal.
4. Sampel kluster (cluster sampling) adalah metode penarikan sampel yang biasanya didasarkan atas lokasi atau wilayah geografis tempat populasi berdomosili.
5. Sampel tanpa acek (non-random sampling) adalah metode penarikan sampel yang terbalik dari sampel acak (Random Sampling).

## DEFINISI POLLING

Masalah polling adalah sebuah masalah atau persoalan yang telah menjadi opini publik. Artinya ketika sebuah masalah telah menjadi konsumsi masyarakat umum, baik yang masih bersifat tersembunyi (laten) maupun telah terekspresikan secara verbal (manifes) dapat disebut sebagai masalah publik. Dengan demikian, dapat dipakai sebagai objek polling, baik menyangkut (isu-isu) politik, ekonomi, sosial budaya maupun keagamaan.

Polling adalah suatu kerja pengumpulan pendapat umum dengan menggunakan teknik dan prosedur ilmiah (Eriyanto, 1999:75). Hal ini untuk membedakan dengan kerja pengumpulan pendapat unum lain yang tidak menggunakan penelitian ilmiah, seperti diskusi, demonstrasi, atau pengukuaran ekspresi pendapat umum lainnya.

Metode yang digunakan dalam mengenali pendapat umum dalam polling adalah metode survei, yakni suatu metode dimana objek adalah orang atau individu dan menggunakan kuisioner sebagai alat untuk mendapatkan data atau informasi. Ada beberapa defenisi kunci yang dapat menggambarkan polling secara keseluruhan.

Polling adalah metode yang memakai sampel untuk menggambarkan sikap atau pendapat populasi. Meskipun memakai sampel, hasilnya dimaksudkan untuk dapat digeneralisasikan pada populasi yang luas. Karena itu dalam penerapan sampel, sangat disarankan untuk memakai prinsip probabilitas sehingga hasil sampel adalah representasi dari populasi sesungguhnya. Polling hanya bisa digunakan untuk menggambarkan sikap atau perilaku (Eriyanto,1999:75).

Ia adalah metode yang tepat untuk mengetahui apa yang publik pikirkan, apa yang publik rasakan terhadap suatu isu atau masalah. Ia dapat mengukur pendapat orang lain mengenai suatu permasalahan yang kontradikasi dalam masyarakat. Polling menggambarkan preferensi, atau intensitas terhadap pilihan pendapat, tapi hanya berhenti sampai di sana. Ia tidak dapat menjelaskan kenapa seseorang melakukan pilihan tersebut.

Polling digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik secara akurat. Akumulasi data yang diperoleh semata-mata untuk deskripsi, ia tidak berusaha untuk mengkaji hipotesis atau menguji konsep tertentu. Polling digunakan untuk mendapatkan informasi tentang suatu fenomena dalam hal ini yang ingin didapat dari polling adalah sikap, pandangan, keyakinan masyarakat terhadap isu-isu yang berkembang. Karena itu dapat juga dikatakan bahwa polling adalah penerapan praktis dari metode survei, pemakaian metode survei untuk mengukur pendapat pulik terhadap isu-isu politik. Pengertian ini untuk membandingkan dengan penerapan praktis dari metode survei untuk keperluan lain.

Dalam pelaksanaannya polling lebih sederhana dari survei akademik. Sifat kesederhanaan itu karena polling menuntut hasil yang cepat, agar hasilnya secepatnya dapat dipublikasikan. Pertanyaan yang ditanyakan kepada publik juga tidak banyak, biasanya tidak lebih dari 20 pertanyaan.

Seperti yang dikatakan oleh Cellinda C. Lake (dalam Eriyanto, 1999:77) berikut ini: “Polling adalah cara sistematis, ilmiah dan terpercaya, mengumpulkan informasi dari sampel orang yang digunakan untuk mengenaralisasikan pada kelompok atau populasi yang lebih luas darimana sampel itu diambil.

Definisi Cellinda ini mencakup empat unsur kunci polling.

1. Cara sistematis, ilmiah, terpercaya.
2. Pengumpulan informasi.
3. Sampel orang.
4. Generalisasi.

Polling tidak didesain untuk menyelidiki atau mengidentifikasi individu untuk keperluan ini, lebih murah dan efisien dengan cara lain seperti penyelidikan telefon. Kesalahan menentukan tujuan polling ini dapat mengakibatkan bias informasi yang didapat. Polling juga tidak dimaksudkan untuk menggambarkan banyak individu secara mendalam. Untuk keperluan ini, studi kasus adalah cara yang lebih efisien. Polling adalah suatu pengukuran pada satu waktu untuk mengetahui sikap, perilaku, kepercayaan dan hubungan antara semua parameter. Lewat generalisasi, hasilnya kemudian dapat diterapkan untuk masyarakat yang lebih luas.

Menurut kamus Inggris-Indonesia John M. Echols dan Hassan Shadaly (1990), Gramedia Jakarta, *polling* berarti penyelidikan pendapat umum, pemungutan suara, jumlah suara. Di negara maju seperti Amerika Serikat, pembentukan opini publik sudah merupakan hal yang sangat penting. Dinas penerangan atau propaganda swasta yang menyebut dirinya sebagai *industrial public relations officer* melakukan kegiatan-kegiatannya dengan memanfaatkan media yang ada.

Selain membentuk opini publik, dinas penerangan tersebut juga melakukan penelitian terhadap opini publik. Hal ini dimaksudkan agar adanya produk baru yang diluncurkan didasarkan oleh opini publik yang ada. Walaupun *public opinion polling* lebih sering digunakan untuk meramalkan hal yang akan datang seperti pemilihan umum presiden. (Helena, 2007:76)

Di Indonesia sendiri ada lembaga seperti *The American Istitute of Public Opinion* *Polling* yaitu Lembaga Pers dan Pendapat Umum di bawah Depatemen Penerangan (dibubarkan tahun 2000). Serta Badan Sensus Penduduk dan Badan Sensus Ekonomi. Selain itu juga ada Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) dan National Democratic Institute (NDI) yang banyak perperan saat Pemilu 2003-2004. Cara pelaksaannya adalah dengan dikelompokan secara teratur dan sistematis, misalnya catatan tentang hasil pemilu dan berbagai statistic lain.

Catatan mencangkup jumlah orang yang menjadi responden.renponden diteliti dikumpulkan datanya menurut lapangan kerjanya masing-masing, menurut golongan, suku/ras, agama atau kepercayaanya, aliran politik, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Kemudian, polling dilakukan sercerma-cermatnya pengambilan sempel tidak boleh terlalu banyak atau terlalu sedikit. Data penduduk harus cocok dengan keadaan yang sebenarnya baik di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Semua ini memerlukan kecermatan berkerja secara teratur dan tidak boleh hanya berdasarkan pemikiran semata.

Tetapi banyak pihak yang meragukan objektivitas *opinion public polling*. Karena sistem kerja dan metode penelitiannya banyak dipertanyakan. Apakah mungkin *public opinion polling* dapat mengumpulkan data-data yang konkret dan mewakili populasi padahal opini publik merupakan suatu hal yang abstrak.

Lingkup masalah polling adalah sebuah masalah atau persoalan yang telah menjadi opini publik. Artinya ketika sebuah masalah telah menjadi konsumsi masyarakat umum, baik yang masih bersifat tersembunyi (laten) maupun telah terekspresikan secara verbal (manifes) dapat disebut sebagai masalah publik. Dengan demikian, dapat dipakai sebagai objek polling, baik menyangkut (isu-isu) politik, ekonomi, sosial budaya maupun keagamaan.

Desain dan ciri polling tidak lepas dari tujuan polling itu sendiri. Menurut Cellinda, tujuan polling adalah untuk mengukur preferensi atau intensitas sikap masyarakat dan tidak berpretensi untuk mengetahui lebih dalam penjelasan atas pilihan-pilihan itu sebagaimana yang lazim dilakukan dalam penelitian survei.

Desain dan ciri polling sekurangnya dapat diringkas dalam dua rangkuman berikut ini. Waktu pelaksanaan dan publikasi hasil polling pendek dan terbatas. Pendapat atau opini publik bisa sangat cepat berubah dan polling ingin menggambarkan opini publik ketika sebuah isu atau masalah mengemuka dan diperbincangkan orang. Objek polling terbatas, hanya dapat menangkap fakta saat itu. Polling ingin menjawab pertanyaan bagaimana sikap publik atau massa pada satu saat, dan tidak sampai menjelaskan mengapa atau apa dasar dan pertimbangan pokok yang mendasari sikap publik tersebut.

Tahapan polling terdiri atas empat, yaitu menentukan tujuan polling, menetapkan populasi dan sampel, menentukan tipe informasi dan menetapkan waktu, serta metode pengumpulan data polling. Keempat tahap ini adalah persiapan sebelum polling benar-benar dilaksanakan.

Menentukan tujuan polling. Penetapan tujuan polling merupakan langkah amat penting. Tujuan polling adalah mengetahui respons publik terhadap persoalan aktual yang tengah terjadi di masyarakat. Tujuan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu untuk mengetahui respons persetujuan publik (setuju – tidak dengan isu atau kebijakan tertentu) dan kedua, untuk mengetahui preferensi atau intensitas sikap publik terhadap isu aktual tersebut. Setelah setuju agar BBM tetap tidak dinaikkan, langkah apakah yang sebaiknya diambil pemerintah, yaitu bertahan, kompromi atau langkah lain?

Setelah tujuan ditetapkan, populasi ditentukan dan diambil sejumlah sampel. Sampel sebaiknya yang representatif, mewakili publik yang dimaksud, dan mengakomodasi heterogenitas (keragaman) dari responden atau publik, misalnya 500 orang dari berbagai latar belakang pekerjaan.

Menentukan tipe informasi, berarti jenis informasi dan sekaligus rumusan pertanyaan dan jawaban yang akan digunakan untuk mengumpulkan data. Umumnya polling menggunakan jenis pertanyaan tertutup, artinya jenis pertanyaan yang pilihan jawabannya telah disediakan dan responden yang diteliti tinggal memilih satu (atau lebih) pilihan jawaban yang telah ada tersebut.

Setelah instrumen siap maka ditetapkan Waktu dan Metode Pengumpulan Data. Oleh karena berada di kota besar dan respondennya orang dewasa serta untuk kepentingan efisiensi maka dipilih waktu tiga hari dan metode melalui telepon. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan pun relatif terbatas, tidak membengkak atau jika yang diinginkan adalah menggunakan kuesioner (tertulis) dan responden dihubungi secara langsung di tempat-tempat umum/publik berada maka dapat ditempuh langkah dengan pilihan metode tersebut. Prinsipnya, waktu dan metode pengumpulan data harus dapat menjamin terkumpulnya data yang lengkap sesuai dengan tuntutan idealitas sebuah penelitian polling pendapat umum.

## Sejarah Polling

Sejarah polling atau jajak pendapat pertama yang dketahui adalah sebuah pengumpulan pendapat setempat oleh The Harrisburg Pennsylvanian pada 1824, yang menunjukkan bahwa Andrew Jackson unggul atas John Quincy Adams dengan 335 banding 169 suara dalam perebutan jaatan Presiden Amerika Serikat. Pengumpulan pendapat seperti itu yang tidak bersifat ilmiah pelan-pelan menjadi makin populer; namun sifatnya tetap lokal dan biasanya hanya meliputi satu kota saja. Pada 1916, Literary Digest melakukan survai nasional (sebagian untuk meningkatkan sirkulasi) dan secara tepat meramalkan terpilihnya Woodrow Wilson sebagai Presiden.

Dengan semata-mata mengirimkan jutaan kartu pos dan menghitung kartu yang kembali, Digest dengan tepat meramalkan keempat pemilihan presiden berikutnya. Namun pada 1936 Digest gagal. Para “pemilih”-nya yang berjumlah 2,3 juta orang merupakan sampel yang banyak. namun, mereka umumnya adalah orang Amerika yang aya, yang cenderung simpatisan Republikan Literary Digest tidak melakukan apa-apa untuk memperbaiki bias ini. Seminggu sebelum hari pemilihan, Digest melaporkan bahwa Alf Landon jauh lebih populer daripada Franklin D. Roosevelt.

Pada saat yang sama, George Gallup melakukan survai yang jauh lebih kecil, namun lebih ilmiah. Dalam jajak pendapat ini ia menggunakan sampel yang secara demografis lebih mewakili. Gallup dengan tepat meramalkan kemenangan besar Roosevelt. Tak lama kemudian Literary Digest bangkrut, sementara industri jajak pendapat mulai berkembang pesat.

## Desain dan Ciri Polling

 Desain dan ciri polling tidak lepas dari tujuan polling itu sendiri. Menurut Cellinda, tujuan polling adalah untuk mengukur preferensi atau intensitas sikap masyarakat dan tidak berpretensi untuk mengetahui lebih dalam penjelasan atas pilihan-pilihan itu sebagaimana yang lazim dilakukan dalam penelitian survei.
Desain dan ciri polling sekurangnya dapat diringkas dalam dua rangkuman berikut ini.

Waktu pelaksanaan dan publikasi hasil polling pendek dan terbatas. Pendapat atau opini publik bisa sangat cepat berubah dan polling ingin menggambarkan opini publik ketika sebuah isu atau masalah mengemuka dan diperbincangkan orang. Objek polling terbatas, hanya dapat menangkap fakta saat itu. Polling ingin menjawab pertanyaan bagaimana sikap publik atau massa pada satu saat, dan tidak sampai menjelaskan mengapa atau apa dasar dan pertimbangan pokok yang mendasari sikap publik tersebut.

Tahapan polling terdiri atas empat tahapan, yaitu:

1. Menentukan tujuan polling,
2. Menetapkan populasi dan sampel
3. Menentukan tipe informasi dan menetapkan waktu
4. Serta metode pengumpulan data polling.

Keempat tahap ini adalah persiapan sebelum polling benar-benar dilaksanakan.

## Tujuan Polling

Penetapan tujuan polling merupakan langkah amat penting. Tujuan polling adalah mengetahui respons publik terhadap persoalan aktual yang tengah terjadi di masyarakat. Tujuan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama untuk mengetahui respons persetujuan publik (setuju – tidak dengan isu atau kebijakan tertentu) dan kedua, untuk mengetahui preferensi atau intensitas sikap publik terhadap isu aktual tersebut. Dapat dicontohkan, setelah setuju agar BBM tetap tidak dinaikkan, langkah apakah yang sebaiknya diambil pemerintah, yaitu bertahan, kompromi atau langkah lain?

Setelah tujuan ditetapkan, populasi ditentukan dan diambil sejumlah sampel. Sampel sebaiknya yang representatif, mewakili publik yang dimaksud, dan mengakomodasi heterogenitas (keragaman) dari responden atau publik, misalnya 500 orang dari berbagai latar belakang pekerjaan. Menentukan tipe informasi, berarti jenis informasi dan sekaligus rumusan pertanyaan dan jawaban yang akan digunakan untuk mengumpulkan data.

Umumnya polling menggunakan jenis pertanyaan tertutup, artinya jenis pertanyaan yang pilihan jawabannya telah disediakan dan responden yang diteliti tinggal memilih satu (atau lebih) pilihan jawaban yang telah ada tersebut.
Setelah instrumen siap maka ditetapkan Waktu dan Metode Pengumpulan Data. Oleh karena berada di kota besar dan respondennya orang dewasa serta untuk kepentingan efisiensi maka dipilih waktu tiga hari dan metode melalui telepon.

Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan pun relatif terbatas, tidak membengkak atau jika yang diinginkan adalah menggunakan kuesioner (tertulis) dan responden dihubungi secara langsung di tempat-tempat umum/publik berada maka dapat ditempuh langkah dengan pilihan metode tersebut. Prinsipnya, waktu dan metode pengumpulan data harus dapat menjamin terkumpulnya data yang lengkap sesuai dengan tuntutan idealitas sebuah penelitian polling pendapat umum.

## Pengaruh Jajak Pendapat (Polling)

Dengan memberikan informasi mengenai niat pemilih, jajak pendapat kadang-kadang dapat mempengaruhi perilaku para pemilih. Berbagai teori tentang bagaimana hal ini terjadi dapat dibagi menjadi dua kelompok: pengaruh ikut-ikutan/underdog, dan pemberian suara strategis (‘taktis’). Pengaruh ikut-ikutan terjadi apabila jajak pendapat mendorong para pemilih untuk mendukung kandidat yang diramalkan menang dalam jajak pendapat. Pendapat bahwa para pemilih mencurigai pengaruh ini sudah lama terjadi. Safire (1993: 43) melaporkan bahwa hal ini pertama kali digunakan dalam sebuah kartun politik dalam majalah Puck tahun itu.

Hal ini juga terus-menerus muncul meskipun tidak ada pembuktian empiris hingga akhir abad ke-20. George Gallup bberusaha keras, namun sia-sia, dalam mencoba mendiskreditkan teori ini pada masanya dengan menyajikan riset empiris. Sebuah studi-meta baru-baru ini mengenai riset ilmiah tentang topik ini menunjukkan bahwa dari 1980-an hingga sekarang pengaruh ikut-ikutan ini lebih sering ditemukan oleh para peneliti (Irwin & van Holsteyn 2000).

Dampak kebalikan dari pengaruh ikut-ikutan ini adalah dampak underdog. Ini sering disebutkan dalam media. Ini terjadi ketika orang memberikan suaranya, karena bersimpati, kepada partai yang dianggap akan ‘kalah’ dalam pemilihan umum. Keberadaan dampak ini kurang mendapatkan dukungan bukti empiris daripada dampak ikut-ikutan (Irwin & van Holsteyn 2000).

Kategori kedua dari teori tentang bagaimana jajak pendapat secara langsung memengaruhi pemberian suara disebut sebagai pemberian suara strategis atau taktis. Teori ini didasarkan pada pendapat bahwa para pemberi suara menganggap pemberian suara sebagai cara untuk memilih suatu pemerintahan. Jadi, mereka kadang-kadang tidak memilih kandidat yang mereka sukai berdasarkan ideologi atau simpati, melainkan kandidat lain yang kurang disukai, karena pertimbangan-pertimbangan strategis.

Contohnya dapat ditemukan dalam pemilihan umum Britania Raya, 1997. Konstituensi Menteri Michael Portillo di Enfield dipercayai sebagai kursi yang aman tetapi berbagai jajak pendapat memperlihatkan bahwa kandidat Buruh Stephen Twigg terus memperoleh dukungan, yang mungkin telah mendorong para pemilih atau pendukung dari partai-partai lain yang belum menetapkan pilihannya untuk mendukung Twigg demi menyingkirkan Portillo.

Sebuah contoh lainnya adalah dampak Bumerang di mana para calon pendukung dari kandidat yang diramalkan menang merasa bahwa ia sudah pasti akan menang, sehingga suara mereka tidak dibutuhkan, dan dengan demikian membiarkan kandidat lainnya menang. Dampak-dampak ini hanya menunjukkan bagaimana jajak pendapat secara langsung memengaruhi pilihan-pilihan politis dari para pemilih. Dampak yang lainnya dapat ditemukan di kalangan para wartawan, politikus, partai politik, pegawai negeri, dll., antara lain dalam bentuk Framing (teori komunikasi) media dan pergeseran ideologi partai.

Polling merupakan instrumen berpengaruh dalam setiap kegiatan politik di Indonesia, Filiphina dan Malaysia. Pada kondisi itu, sebagai refleksi dari negara demokratis, ekspresi politik publik melalui polling menjadi bahan pertimbangan atau subjek dalam pengambilan keputusan dari setiap kebijakan negara. Ini artinya, polling berperan bukan hanya dalam rangka pemilu, namun lebih dari itu juga memiliki peran dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah. Melalui polling pemerintah dapat mengukur aspirasi dan keinginan publik.

Meski masih menyisakan berbagai kendala dan tantangan, namun lembaga-lembaga polling yang ada di Indonesia, Filiphina dan Malaysia sepertinya akan tetap memiliki pengaruh yang kuat di masa mendatang dengan menempatkan publik sebagai subjek politik. Inilah arti penting dari eksistensi polling yang sebenarnya, yakni menempatkan publik bukan sebagai objek politik, melainkan sebagai subjek yang dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam setiap proses pengambilan kebijakan dalam pemerintahan.

## Polling di Indonesia

Tahapan perkembangan politik di Indonesia mirip dengan babakan sejarah yang terjadi di Filiphina, dimana Indonesia pernah mengalami sistem demokrasi (pada masa awal kekuasaan Orde Lama), kemudian masuk ke era otoriter (pada masa akhir Orde Lama dan sepanjang pemerintahan Orde Baru), kemudian kembali menganut sistem demokrasi pada era pasca Orde Baru. Perjalanan karakter sistem politik ini memberi pengaruh pada karakter polling. Yang penting dicatat adalah eksistensi polling selama pemerintahan Orde Baru dan sesudahnya. Pada era Orde Baru, polling sebagai instrumen survey opini publik sangat terbatas bagi masyarakat. Metodologi dan kualitas teknisnya sederhana, bersifat sektoral, dan dikendalikan pemerintah. Pada kondisi ini sulit untuk mengharapkan hasil yang memuaskan.

Pada era pasca Orde Baru antusiasme lembaga-lembaga polling kembali tumbuh yang diikuti dengan perubahan dari aspek metodologi dan pencapaian hasil polling. Pada era ini polling kemudian dijadikan referensi pada setiap pemilu yang dilaksanakan. Ada banyak lembaga polling yang tumbuh pada era pasca Orde Baru. Pada pemilu tahun 1999, beberapa lembaga yang berpengaruh antara lain adalah lembaga polling non-profit International Foundation for Election System (IFES-sebuah lembaga survey asing di Indonesia), LP3ES, Resource Productivity Center (RPC), jajak pendapat Kompas (dari media), dan jajak pendapat Universitas Indonesia (dari universitas).

Sebagai langkah awal, kelima lembaga polling ini memang masih kurang akurat dalam melakukan prediksi dari porsi pemilih. Namun ketepatannya memprediksi kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pemenang pemilu 1999 merupakan prestasi yang gemilang dari kelima lembaga itu. Perbaikan metodologi dan keragaman model survey dilaksanakan pada pemilu tahun 2004.

Dari segi metodologi, bukan hanya penggunaan metode sampling dan teknik pengumpulan data saja yang ditingkatkan, namun juga dalam melakukan analisis data. Sementara dari segi keragaman model survey telah diimplementasikan survey pra-pemilu, exit-poll dan juga quick count (penghitungan cepat). Di samping dua hal itu, pada pemilu 2004 juga muncul lebih banyak lembaga polling baru yang kredibel, seperti Lembaga Survey Indonesia (LSI), Sugeng Sarjadi Syndicate (SSS) dan Danareksa Research Institute (DRI-dari Balitbang PDIP). Namun tiga yang paling berpengaruh adalah IFES, LSI dan LP3ES.

Hasil polling lembaga-lembaga tersebut relatif akurat dengan ketepatan memprediksi kemenangan Partai Golkar sebagai partai pemenang pemilu legislatif dan kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono dan jusuf Kalla sebagai pemenang pilpres. Pada prediksi pilpres SBY-Kalla, akurasi LP3ES paling tinggi. Dari total responden 2.525, LP3ES mendekati hasil yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hasil dari KPU menyatakan suara SBY-Kalla sebesar 33,57%, sementara prediksi LP3ES 35,8%. Hasil ini memberikan rasa percaya diri yang besar pada lembaga-lembaga polling untuk Indonesia mendatang.

Terlepas dari Bagaimana fenomena yang terjadi di Negara kita mengenai Polling, sungguh menarik mencermati hasil polling terhadap capres dan cawapres di beberapa media cetak dan elektronik saat ini. Terjadi disparitas yang amat mencolok dari hasil penyelenggara polling. Beberapa nama capres unggul dalam polling yang dilakukan sejumlah lembaga penyelenggara, tetapi jeblok dalam polling yang dilakukan lembaga lainnya. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah hasil polling yang dipublikasikan media massa ini menunjukkan dinamika politik, atau justru telah terjadi kekeliruan dalam metodenya?

Hasil polling politik ini, terlepas dari rendahnya penerapan prinsip-prinsip survey, jelas bukan sekadar mencerminkan pilihan emosional publik. Disparitas hasil polling selayaknya harus dimaknai secara hati-hati. Menyimpulkan telah terjadi penyimpangan prosedur karena alasan kesalahan metodelogis maupun adanya muatan politis, jelas tuduhan yang sumir. Tetapi, membiarkannya tanpa upaya kritis dari semua pihak yang beraharap polling politik sebagai instrumen dalam proses demokratisasi, juga bukan sikap yang bijak. Sejatinya, polling politik tidak terjerumus menjadi strategi politik yang didesain untuk merusak tatanan kehidupan demokrasi politik yang tengah dibangun bersama dengan susah payah.

## Pemungutan Suara dan Quick Count

Hadirnya teknologi seperti Quick Count (Perhitungan Cepat Pemilu) saat ini memiliki manfaat penting dalam Pemilukada atau Pilpres di setiap daerah bahkan setingkat Pilpres (Pemilihan Presiden). Banyak Lembaga-lembaga survey seperti LSI, LP3ES, Puskaptis, CIRUS, LRI dan lain-lain melakukan survey perhitungan cepat untuk mengetahui hasil Pemilukada atau Pilpres. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil Quick Count (perhitungan cepat) ini cukup tinggi karena prosesnya yang cepat.

Kecepatan ini di dapat karena dalam quick count tidak menghitung semua TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang jumlahnya mencapai ratusan ribu TPS, namun cukup dengan sebagian kecil TPS sebagai sampel. Jika penarikan sampel dilakukan dengan benar dan prosedur pecatatan dilakukan dengan baik, hasil quick count akan sama dengan hasil perhitungan suara di seluruh TPS meski hanya memakai sebagian kecil TPS sebagai sampel.

Metode quick count ini memiliki kelemahan yaitu hasil quick count bisa menjadi masalah (perhitungan meleset jauh) bagi masyarakat jika tidak dilakukan dengan metodologi yang tepat dan pengorganisasian relawan yang baik. Seperti yang pernah terjadi pada beberapa Pilkada, hasil quick count yang berbeda-beda dari beberapa lembagai survei lainnya menjadi pemicu perselisihan antar pendukung kandidat karena saling mengklaim sebagai pemenang Pilkada.

Sejarah munculnya pengumpulan data dengan penghitungan cepat (quick count) berawal dari rentetan peristiwa berupa pemberdayaan suara rakyat melalui polling. Sejarah polling dimulai dengan bentuk orator atau pidato di abad 5 SM, dimana publik menyampaikan pendapat umum berdasarkan perdebatan dalam mengajukan gagasangagasannya (Sumargo 2006).

Quik count pertama kali digunakan oleh NAMFREL (National Citizens Movements For Free Election) yang memantau pelaksanaan Pemilu 1986 di Filipina dimana ada dua kandidat yang bersaing ketat yakni Ferdinand Marcos dan Corazon Aquino. NAMFREL berhasil menemukan berbagai kecurangan dan manipulasi suara serta secara meyakinkan dapat menunjukkan kemenangan Cory Aquino, sekaligus menggagalkan klaim kemenangan Marcos. Kebijakan Marcos yang menganulir kemenangan Cory selanjutnya menjadi dasar pembangkangan sipil dan perlawanan rakyat Filipina dalam bentuk people power yang berhasil menggulingkan rezim otoriter Marcos.

Sehingga secara tidak langsung quick count sebagai bagian dari kontrol terhadap pemilu dan bagian dari upaya untuk menegakkan demokrasi dengan mendorong berlangsungnya pemilu yang jujur dan adil. Quick count telah diterapkan di Indonesia sejak 1997 oleh LP3ES (Lembaga Pelatihan, Penelitian, Penerangan, Ekonomi dan Sosial) pada pemilu terakhir rezim Soeharto yang dilakukan secara diam-diam bekerjasama dengan salah satu kekuatan politik. Quick count ini cukup berhasil, dengan satu hari setelah pelaksanaan pemilu LP3ES mampu memprediksi hasil pemilu di DKI Jakarta persis sebagaimana hasil perhitungan suara oleh LPU (Lembaga Pemilihan Umum).

Tetapi karena pertimbangan keamanan dan politik, hasil tersebut tidak diumumkan pada masyarakat. Pada pemilu 1999, LP3ES dengan quick count berhasil pula dalam memprediksi secara tepat urutan partai dan persentase suaranya di propinsi NTB dan pulau Jawa. Selanjutnya pada pemilu 2004, LP3ES kembali membuat quick count bekerjasama dengan National Democratic Institute for International Affairs (NDI), lembaga internasional dari Amerika yang sudah terbiasa dengan penghitungan cepat. LP3ES-NDI secara akurat berhasil memprediksi pemenang pemilu dan komposisi pemenang pemilu dari urutan 1 sampai 24.

Seringkali pelaksanaan quick count pada pemilu disertai oleh exit poll, kedua metode pengumpulan data ini dilakukan setelah pemilu. Exit poll merupakan metode mengetahui opini publik yang dilakukan sesaat setelah seseorang keluar dari bilik suara (TPS). Pertanyaan dalam exit poll umumnya juga sedikit (kurang dari 10 pertanyaan). Salah satu informasi yang digali dalam exit poll adalah alasan memilih sehingga distribusi suara pemilih dapat diketahui lebih dalam.

## Definisi Quick Count

Quick count atau penghitungan cepat adalah proses pencatatan hasil perolehan suara di ribuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dipilih secara acak (Ujiyati 2004).

Exit poll adalah metode mengetahui opini publik yang dilakukan sesaat setelah keluar dari bilik suara (LSI 2004). Quick count merupakan prediksi hasil pemilu berdasarkan fakta bukan berdasarkan opini. Sehingga quick count tidak sama dengan jajak pendapat terhadap pemilih yang baru saja mencoblos atau yang biasa disebut exit poll. Sejumlah lembaga mengembangkan quick count dengan exit poll dengan wawancara sampel terpilih untuk mengetahui lebih dalam distribusi suara pemilih (Kristanto 2007).

Menurut Sumargo (2006) keberhasilan hasil pelaksanaan quick count ditentukan beberapa faktor diantaranya adalah:

1. Syarat yaitu adanya akses ke TPS, kredibilitas dan independensi, jaringan di akar rumput (grass root), dan dukungan komunikasi data
2. Pelatihan, seluruh elemen yang terlibat dalam kegiatan ini diberi pelatihan.
3. Quality control yaitu:
4. kepada relawan diminta untuk melakukan validasi hasil pencatatan perolehan suara
5. validasi dilakukan dengan meminta tandatangan ketua pada TPS yang dipantau
6. satu minggu sebelum hari pemilu dilaksanakan dilakukan monitoring untuk memastikan apakah proses persiapan pemantauan berjalan sebagaimana seharusnya
7. memastikan apakah data yang diperoleh adalah benar dan valid dengan spotcheck
8. daerah ataupun TPS yang dikunjungi untuk spotcheck dipilih secara acak.

## Penyelenggaraan Quick Count dan Exit Poll

Penyelenggara Quick Count dan Exit Poll Quick count dan exit poll sebaiknya dilakukan oleh organisasi yang kredibel, independen, memiliki sumber daya memadai dan didukung teknologi komunikasi serta akses informasi yang luas (Ujiyati 2004). Quick count dan exit poll membutuhkan keahlian khusus, oleh karena itu memerlukan penyelenggara yang mengikuti dinamika politik nasional dan mampu mengorganisir masyarakat secara nasional.

Penyelenggara harus memiliki orang yang memahami kemampuan di bidang teknologi komunikasi. Di Indonesia lembaga yang telah melakukan quick count dan exit poll diantaranya adalah Litbang Kompas, Lembaga Survei Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).

## Komunikasi Data Quick Count

Jumlah lokasi pantauan (TPS) yang mencapai ribuan dengan melibatkan ribuan orang relawan, tentu bukan pekerjaan sederhana, terutama dalam aspek komunikasi data. Organisasi pelaksana harus menyiapkan perangkat komunikasi data yang terpusat. Arus komunikasi dilakukan dua arah : dari relawan (di lokasi TPS terpantau) untuk pengiriman data lapangan dan dari pusat untuk tujuan pengecekan.

Tahapan proses quick count secara singkat menurut LSI & JIP (2007) adalah:

1. Menentukan jumlah TPS yang akan diamati
2. Memilih TPS yang akan diamati secara acak
3. Manajemen data (pengamatan, pencatatan, dan analisa data hasil perhitungan suara)
4. Publikasi hasil quick count Sampel Stratifikasi (Stratified Random Sampling) Sampel stratifikasi (stratified random sampling) merupakan teknik penarikan sampel dengan sampling unit dikelompokkan menjadi beberapa strata (kelompok) sehingga sampling unit dalam satu strata relatif homogen (Scheaffer et al. 1990).

Menurut Levy & Lemeshow (1999), alasan digunakan sampel stratifikasi adalah:

1. Kesederhanaan dari simple random sampling, potensial memperoleh signifikan dalam reabilitas.
2. Populasi harus dibagi dalam k strata yang saling bebas satu sama lain.
3. Penarikan sampel dilakukan secara bebas di setiap strata.

Penetapan jumlah sampel per strata ditentukan oleh tiga faktor berikut :

1. Jumlah populasi setiap strata
2. Ragam setiap strata
3. Biaya pengambilan sampel per strata.

Kelebihan dari sampel stratifikasi ini adalah pada waktu melakukan analisis dapat disajikan secara keseluruhan, per strata ataupun membandingkan antar strata.

## Sampel Klaster (Cluster Sampling)

Sampel klaster (cluster sampling) adalah sampel peluang dengan masing-masing unit sampel (sampling unit) merupakan kumpulan atau klaster dari elemen (Scheaffer et al. 1990). Elemen didefinisikan sebagai obyek dimana pengukuran akan dilakukan. Sedangkan sampling unit mempunyai arti yang hampir sama dengan elemen tetapi ada syarat tidak boleh tumpang tindih. Teknik penarikan sampel pada dasarnya dibedakan menjadi dua yakni berdasarkan kerangka sampel (sampling frame) dan tidak berdasar kerangka sampel.

Sampling frame adalah daftar dari keseluruhan elemen populasi, contohnya daftar nomor telepon. Teknik berdasarkan kerangka sampel disebut probabilistic sampling, dengan memiliki karakteristik setiap elemennya diketahui sehingga penduga tak bias dapat dibuktikan. Sedangkan teknik penarikan sampel tanpa kerangka sampel disebut non probabilistic sampling/quota/purposive/judgement, teknik ini sering digunakan untuk survei pemasaran dan opini publik.

Cara pengambilan sampel pada cluster sampling adalah:

1. Populasi dibagi menjadi c klaster
2. Dari c klaster selanjutnya dipilih secara acak sebanyak k klaster
3. Seluruh elemen dari k klaster terpilih diambil.

Sampel klaster merupakan desain yang efektif untuk memperoleh sejumlah informasi khusus dengan biaya minimum bila memenuhi kondisi (Scheaffer et al. 1990) :

1. Frame listing elemen populasi yang baik tidak ada atau sangat mahal, sementara frame listing klaster mudah diperoleh.
2. Biaya untuk memperoleh objek-objek yang terpilih sangat mahal karena faktor geografi maka klaster akan mengurangi biaya.

Quick count mempunyai fungsi utama sebagai alat kontrol terhadap penyelenggara pemilu dan memperkirakan perolehan suara pemilu. Sebagai alat kontrol, quick count mampu mendeteksi dan melaporkan penyimpangan atau mengungkapkan kecurangan. Banyak sampel membuktikan quick count dapat membangun kepercayaan atas kinerja penyelenggara pemilu dan memberikan legitimasi terhadap proses pemilu.

Kegiatan pengumpulan data dengan quick count seringkali diikuti oleh kegiatan exit poll. Exit poll sangat berguna dalam mengetahui kecenderungan pemilih. Proses perhitungan suara oleh lembaga resmi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), meskipun memakai sistem teknologi informasi yang canggih dan berbiaya mahal namun kenyataannya sangat lamban.

Hasil kasar perhitungan suara baru dapat diketahui dua minggu setelah perhitungan suara. Sementara perhitungan resmi baru dapat dilakukan satu bulan setelah pemungutan suara. Dengan penghitungan cepat (quick count) maka mampu memenuhi keingintahuan segera publik atas hasil pemilu. Keberhasilan quick count dan exit poll sangat dipengaruhi oleh teknik penarikan sampel yang baik dan keakuratan serta presisi dari hitungan yang dihasilkan.

# DAFTAR PUSTAKA

* Olii, Helena dan Novi Erlita. 2011. Opini Publik. Jakarta. PT Indeks
* Sastropoetro, Santoso R.A. Pendapat Publik, Pendapat Umum dan Khalayak Dalam Komunikasi Sosial. Bandung : Remajakarya. 1897.
Ali, Novel. Peradaban Komunikasi Politik. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 1999
* <https://musalim12ur.wordpress.com/2014/05/07/pendapat-umum-dan-polling/>
* <http://yusufabdin.blogspot.com/2014/11/pengertian-public-opinion-polling.html>
* <https://tonz94.com/pers/media-polling/>
* <https://massofa.wordpress.com/2008/02/24/penelitian-komunikasi/>
* Wagearto, Budi Indra. Universitas Dian Nuswantoro, Semarang. <http://eprints.dinus.ac.id/12063/1/jurnal_11917.pdf>
* Kismiantini. Pengumpulan Data Dengan Quick Count Dan Exit Poll. Universitas Negeri Yogyakarta. http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Kismiantini,%20S.Si.,M.Si./A2007\_B1.pdf